



Layanan Berbasis Online Wujudkan 'Smart City'

● YULIANINGSIH, RIZMA RIYANDI

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini dimanfaatkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperkuat layanan masyarakat. Mulai tahun ini, dihadirkan layanan melalui website dan aplikasi Android.

Berbagai aspek layanan, baik pengaduan maupun pendaf-taran administrasi kependudukan, dikembangkan melalui tek-nologi tersebut. Menurut Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Setda Kota Yogyakarta, Sukadarisman, pe-ngembangan layanan berbasis online dilakukan untuk mewu-judkan Yogyakarta sebagai Kota Cerdas atau 'Smart City'.

Langkah yang diterapkan untuk mewujudkan hal ter-sebut antara lain dengan p engembangan sistem informasi manajemen antarinstansi. "Demikian pula layanan keluhan berbasis elektronik, penerimaan peserta didik sistem online, serta memperbanyak ruang dengan layanan akses internet gratis," katanya, belum lama ini.

Layanan aduan berbasis online dikembangkan melalui program di Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPIK). Layanan belajar siswa dikembangkan melalui sistem website di program Konsultasi Belajar Online (KBS) yang dikelola Dinas Pendidikan.

Ke depan kata dia, layanan ini akan terus dikembangkan hingga tingkat wilayah berbasis website dan Android. Untuk itu, pihaknya tengah meningkatkan kapasitas penyimpanan data atau bank data kependudukan melalui pembangunan gedung untuk pangkalan seluruh data di kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Layanan berbasis online kini menjadi lini terdepan dalam pembuatan dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta, Sisruadi, pihaknya meluncurkan layanan Administrasi Penduduk (Aminduk) online melalui web kependudukan.jogjakota.go.id. "Cukup dengan mengakses website kami, masyarakat dapat mengunduh formulir pembuatan akte kelahiran," ujarnya.

Setelah mengunduh dan mengisi formulir pembuatan akte, masyarakat bisa langsung mendaftarkan diri dengan mengunggah seluruh persyaratan pembuatan akte kelahiran. Setelah itu, semua persyaratan diproses. Jika berkas yang di-unggah sudah benar, proses pembuatan akta dilanjutkan.

Menurut Sisruadi, sejak diluncurkan Maret lalu sampai sekarang, pengguna layanan akte kelahiran online sudah mencapai 50 orang per hari. Ia menilai layanan ini mampu membantu masyarakat dengan cara yang praktis.

■ ed : yusuf.assidiq

Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutedjo, menargetkan hingga akhir 2016, pihaknya bisa merealisasikan 75 persen dari 120 inovasi layanan publik yang sudah dihasilkan SKPD setempat.

Salah satu inovasi layanan yang segera diluncurkan adalah Standar Pelayanan Publik (SPP) di kelurahan. Melalui sistem layanan yang sudah dibangun, nantinya semua layanan publik di 45 kelurahan di Yogyakarta akan terstandar. Begitu pula SPP kecamatan juga akan diluncurkan.

Melalui penerapan inovasi layanan publik yang mencapai tingkat wilayah ini, ia menegaskan, Pemkot ingin memastikan semua masyarakat terlayani secara baik dan terstandar, mudah, cepat, dan memiliki kepastian akurat.

Lebih lanjut diakui, dari ratusan inovasi layanan publik ini, belum semua bisa terealisasi untuk dilaksanakan karena berbagai kendala. Hingga akhir 2015 lalu, baru 60 inovasi layanan publik yang sudah bisa direalisasikan. "Beberapa kendala yang dihadapi adalah aturan teknis yang seringkali kurang mengakomodir penerapan inovasi layanan tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, dari beragam inovasi layanan yang sudah diterapkan, hasilnya dinilai cukup memuaskan. Terbukti dari berhasil diraihinya penghargaan pada akhir 2015 lalu. Saat itu, Pemkot berhasil meraih Inovasi Administrasi Award (INAGARA) 2015 dari LAN sebagai 'Pemkot Inovator Terbaik Layanan Publik se-Indonesia'.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri, menegaskan tahun ini pengembangan inovasi layanan di Yogyakarta bukan hanya berbasis pada SKPD saja. Namun juga berbasis pada personil pejabat di setiap bidang atau kepala SKPD yang ada. Hal ini dilakukan sesuai model pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan yang digelar setiap lembaga peningkatan kualitas personil pejabat di Indonesia termasuk pejabat daerah.

"Model diklat jabatan yang dikembangkan berbeda. Saat ini, berbasis pada masalah di lapangan. Setiap personil pejabat yang kita kirim diklat diwajibkan memiliki proyek layanan baru atau inovasi layanan baru. Mereka diwajibkan membuat karya tulis tentang proyeknya ini dan diminta presentasi serta mempraktikkannya di lembaga di daerah. Mentornya atasannya langsung," ujarnya.

Hasilnya, papar Titik, setiap pejabat yang pulang mengikuti diklat bisa memiliki satu inovasi layanan baru yang dapat diterapkan di lembaganya. Beberapa di antaranya bahkan bisa menjadi unggulan layanan baru di Yogyakarta. "Karena mentornya atasannya langsung jadi bisa mengawasi dan memantau pelaksanaannya," kata dia.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005